

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN GRATIS DI KELURAHAN NENANG  
KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

**ABDUL HAMID<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, adapun narasumber yang peneliti ambil yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Penajam Paser Utara, Kepala SDN 002 Penajam, Kepala SMPN 10 PPU dan Masyarakat Kelurahan Nenang.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilaporkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terlaksana baik dari sasaran pendidikan gratis, peran serta masyarakat, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sudah berjalan namun belum optimal terlihat dari masih banyak anak yang tidak sekolah yang belum terakomodir dengan baik dan masih banyak yang perlu dibenahi terkait penyelenggaraan pendidikan gratis.*

***Kata Kunci*** : *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Gratis.*

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan institusi pemerintah daerah yang memiliki peranan penting dan strategis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di semua jenjang usia. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pelayanan pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Kebijakan pelayanan pendidikan gratis diharapkan dapat mempercepat realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui kebijakan tersebut diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ketidakmampuan ekonomi orang tua.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Yoo\_hamid@yahoo.co.id

Tetapi seiring dengan berjalannya program pendidikan gratis yang dikatakan sudah berjalan dengan baik ternyata terdapat masalah di dalamnya yaitu masih banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri ribuan anak usia sekolah terpaksa putus sekolah. Dari pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), jumlah anak usia sekolah di daerah itu yang putus sekolah sebanyak 5330 orang atau sekitar 14% dari jumlah anak usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data tersebut diperoleh dari pendataan selama lebih setahun di 4 kecamatan, 54 desa/kelurahan di wilayah itu. Kemudian di Kelurahan Nenang sendiri yang termasuk daerah Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara ada sekitar 82 orang anak putus sekolah atau 1,5 % dari persentase jumlah anak putus sekolah se-kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya.

Jika dilihat dengan seksama program pendidikan gratis di Kelurahan Nenang kabupaten Penajam Paser utara belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal mengingat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum merasakan proses pendidikan khususnya pendidikan formal. Belum lagi siswa masih harus memberikan beban bagi orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak ter pikirkan dalam konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang kemudian diamanatkan kepada pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan suatu tindakan guna menilai sejauh mana kebijakan ini telah berjalan, bagaimana kebijakan ini dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan apakah kebijakan ini dapat mencapai sasarannya. Hal ini yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah bila kebijakan ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis mencoba melakukan suatu penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan bupati penajam paser utara nomor 18 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan peraturan bupati penajam paser utara nomor 18 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan bupati penajam paser utara nomor 18 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Manfaat Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian diharapkan berguna sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu pemerintahan terutama pada bidang kebijakan publik dan sebagai masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik pada bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pelaksana kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Penajam Paser Utara serta sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik ke depannya.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Kebijakan***

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batas-batas atau konsep kebijakan yang lebih tepat.

Menurut Friedrich (dalam Islami 2004:17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Anderson (dalam Winarno 2002:14), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Selain itu menurut Friedrich (dalam Agustino 2006:18) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mengarah dengan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan yang akan dibuat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono 2008:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Jones (dalam Agustino 2006:102) mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan diantara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Selanjutnya definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Anderson (dalam Islami 2004:19) mengatakan bahwa kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Wibowo (2004:8) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah kajian dan juga praktik dari sebuah organisasi pemerintahan, memiliki tiga cakupan yang menonjol dalam analisis-analisisnya. Ketiganya adalah pertama, posisinya yang strategis dalam penentuan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada dalam masyarakat, kedua, menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan ketiga, kemampuannya untuk mengetahui/memetakan ukuran dan besarnya organisasi publik tersebut.

Kemudian Islami (2004:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan publik menurut Widodo (2009:85) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus

studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Agustino (2006:138) implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Kemudian Meter dan Horn (dalam Agustino 2006:139), mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino 2006:139) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan setelah undang-undang ditetapkan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

### ***Pendidikan***

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli (pendidikan).

Menurut Langeveld (dalam Hasbullah 2005:2) Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa

(atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Kemudian Dewey (dalam Hasbullah 2005:2) mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Setelah itu Rousseau (dalam Hasbullah 2005:2) mendefenisikan pendidikan adalah member kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada anak agar anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

### ***Pendidikan Gratis***

Dalam peraturan bupati penajam paser utara nomor 18 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis menjelaskan bahwa pendidikan gratis adalah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai komponen yang mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud meliputi pendidikan pada TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sedangkan Pendidikan non formal meliputi pendidikan pada Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

### ***Defenisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konsepsional yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis merupakan bentuk dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kemudian ditujukan kepada pemerintah daerah berupa bantuan anggaran pendidikan dimana setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan

serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”.

### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dan dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2004:7) bahwa Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama, batasan menentukan kenyataan ganda yang mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam menentukan batasan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian kali ini adalah:

1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, meliputi yaitu:
  - a. Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis;
  - b. Peran serta masyarakat;
  - c. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. pemilihan informan dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling . Adapun yang menjadi informan inti (key informan) adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, dan yang menjadi informan adalah Kepala SDN 002 Penajam, Kepala SMP Negeri 10 Kabupaten Penajam Paser Utara, 5 orang tua murid dan 5 orang tua anak putus sekolah.

### ***Analisis Data***

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Alir yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 335), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup :

- a. Pengumpulan Data  
Adalah data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- b. Reduksi Data  
Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke

dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara***

Penajam Paser Utara memiliki luas 3.333,06 km<sup>2</sup>. Secara geografis berbatasan langsung dengan Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser dan Selat Makassar di sebelah timur. Luas daratan Penajam Paser Utara mencapai 3.060,82 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut 272,24 km<sup>2</sup>. Letak astronomisnya antara 116019'30"- 116056'35" Bujur Timur dan antara 00048'29" - 01036'37" Lintang Utara. Topografi wilayah Penajam Paser Utara berada pada ketinggian 0-150 m diatas permukaan laut (dpl). Dengan tingkat lereng 15-40 % tersebar di wilayah bagian barat sedangkan bagian Timur memiliki tingkat lereng 0 – 5 persen. Suhu rata-rata di Penajam Paser Utara tahun 2014 berkisar antara 250C dengan kecepatan angin rata-rata 3 knot/jam. Bagian Timur Penajam Paser Utara terdiri daerah rawa dan pasang surut sedangkan bagian barat merupakan daerah perbukitan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai.

Sedangkan kondisi iklim di Kabupaten Penajam Paser Utara, pada umumnya sama dengan kondisi iklim Indonesia lainnya, yakni iklim tropis. Serta mempunyai dua musim: musim kemarau dan musim hujan.

### ***Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis***

Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis adalah objek yang menjadi suatu tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyelenggaraan pendidikan gratis. Objek yang dimaksud adalah anak usia sekolah yaitu 6 tahun hingga 19 tahun atau seluruh siswa dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat diidentifikasi bahwa sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan, namun tidak secara maksimal dan masih kurang baik. Dilihat masih cukup besarnya jumlah persentase anak putus sekolah di Kelurahan Nenang yaitu sekitar 7,28 %.

### ***Peran Serta Masyarakat***

Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di Kelurahan Nenang.

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diidentifikasi bahwa peran serta masyarakat dalam menyukseskan kebijakan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dapat dilihat dengan cukup baiknya tingkat partisipasi masyarakat di 2 (dua) sekolah Kelurahan Nenang yang menjadi titik fokus penelitian. Kendala yang dihadapi masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan gratis sehingga, apabila ada suatu pungutan hal itu disebut salah aturan dan sebagainya.

### ***Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan***

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan adalah melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penanggungjawaban keuangan yang wajib dilaporkan penyelenggara pendidikan negeri dan swasta disusun dalam bentuk APBS (Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah).

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya SDN 002 dan SMPN 10 melaksanakan kewajiban dengan baik sehingga proses pengelolaan dan pertanggungjawaban yang tercantum dalam kebijakan pendidikan gratis dapat terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dengan kedisiplinan penyelenggara pendidikan yaitu pihak sekolah dengan rutin melaporkan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga per tiga bulan sekali dengan mengikuti prosedural yang ada.

### ***Faktor Penghambat dan Pendukung***

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan hambatan dalam mencapai tujuan sedangkan, faktor pendukung adalah segala sesuatu yang mendukung suatu kegiatan dalam hal mencapai tujuan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang didapatkan ialah

- Besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pendidikan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Dukungan dan komitmen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis;
- Adanya tenaga didik atau guru yang berkualitas;
- Meningkatkan jumlah anggaran dana pendidikan gratis;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

Kemudian dari beberapa wawancara di atas didapatkan faktor penghambat adalah

- masih kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan gratis;
- kurangnya perhatian masyarakat tentang pendidikan.

Dilihat dari hal tersebut implementasi kebijakan pendidikan gratis dapat diterapkan dengan cukup baik karena adanya dukungan atau komitmen dari pihak-pihak yang terkait, yaitu kebijakan dari pemerintah daerah dan kedisiplinan pelaksana pendidikan yakni sekolah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan, namun belum optimal. Kesimpulan tersebut diambil dari beberapa hasil wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah semua anak usia sekolah di Kelurahan Nenang baik miskin maupun anak mampu. Di Kelurahan Nenang sendiri masih banyak anak yang tidak sekolah yang belum terakomodir dengan baik dari jumlah anak usia sekolah yaitu sekitar 1.126 anak yang terakomodir sekitar 1.044 anak atau 92,72% dari jumlah anak usia sekolah dan sisanya 82 anak atau 7,28% dari jumlah anak usia sekolah adalah anak putus sekolah.
2. Peran serta masyarakat dalam menyukseskan kebijakan pendidikan gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dapat dilihat dengan cukup baiknya tingkat partisipasi masyarakat di 2 (dua) sekolah Kelurahan Nenang yang menjadi titik fokus penelitian. Seperti halnya di SMPN 10 Kabupaten Penajam Paser Utara orang tua murid di sekolah tersebut sangat antusias sekali dalam hal berpartisipasi pembangunan musholla. Kendala yang dihadapi masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan gratis sehingga, apabila ada suatu pungutan hal itu disebut salah aturan dan sebagainya.
3. Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban di 2 (dua) sekolah yaitu SDN 002 Penajam dan SMPN 10 Kabupaten Penajam Paser Utara yang tercantum dalam

kebijakan pendidikan gratis dapat terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dengan kedisiplinan penyelenggara pendidikan yaitu SDN 002 Penajam dan SMPN 10 Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rutin melaporkan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga per tiga bulan sekali dengan mengikuti prosedural yang ada.

4. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pendidikan Gratis didapatkan ialah Besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pendidikan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara, Dukungan dan komitmen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis, Adanya tenaga didik atau guru yang berkualitas, Meningkatkan jumlah anggaran dana pendidikan gratis dan Meningkatkan sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2012 adalah Masih kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan gratis dan Kurangnya perhatian masyarakat tentang pendidikan.

### **Saran**

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens baik kepada sekolah maupun masyarakat, mengenai gambaran yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, sehingga sekolah dan masyarakat mengetahui pendidikan gratis yang dimaksud Pemerintah daerah. Kemudian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal pihak sekolah selaku pelaksana pendidikan juga harus ikut serta dalam sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Nenang, bahkan pemerintah dan sekolah juga perlu melakukan strategi-strategi baru seperti halnya melakukan pendekatan-pendekatan perspektif secara kekeluargaan misalnya dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya untuk dapat mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah dengan gratis.
2. Pihak sekolah haruslah lebih sering melakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pendidikan Gratis mengenai sumbangan sukarela secara langsung maupun tidak langsung sesuai satuan pendidikan yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Dari hal itu akan memberikan pemahaman masyarakat apakah sekolah tersebut boleh memungut biaya atau tidak. Kemudian dana yang didapat dijelaskan kepada orang tua murid, sehingga dari hal tersebut orang tua murid dapat mengetahui alokasi dana digunakan untuk pembangunan sekolah sesuai dengan Kebijakan Pendidikan Gratis.
3. Dalam hal ini Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah haruslah melaksanakan pendidikan dan latihan mengenai bagaimana prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BOSDA dan BOS, agar sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Kelurahan Nenang dapat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban dengan sangat baik sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku Referensi:***

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Hasbullah. 2005. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan publik (berbasis dinamic policy analysys). Gava media: Yogyakarta.
- Islami, Irfan. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. 2007. Terjemahan : Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia (UI-PRESS): Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nabuko, Achmadi. 2001. Informan Penelitian. Mandar Maju: Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang. Pusaka pelajar: Yogyakarta.
- Subarsono, 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Tika, Pabundu. 2006. Budaya Organisasi Peningkatan Kinerja Perusahaan. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tirtaraharjda, Umar & La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wibowo, Eddy, dkk. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. YPAPI: Yogyakarta.
- Widjaja, Haw. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik (konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik). Bayumedia Publisting: Malang.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo: Yogyakarta.

### ***Dokumen-dokumen:***

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Rencana Strategi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara 2014.

Statistik Daerah Penajam Paser Utara 2014.

Lakip Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara 2014.

***Sumber Internet:***

<http://www.balikipapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=87647> (diakses 18 agustus 2014)

<http://riauheadline.com/view/Pendidikan/6301/Program-Pendidikan-Gratis-Pemkab-Siak-Belum-Maksimal.html#.U-9lyuRkMnI> (diakses 20 agustus 2014)

<http://www.ppukab.bps.go.id> (diakses 10 Januari 2014)